



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

PENDIDIKAN PANCASILA



KELAS VIII

PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang kamu anggap benar pada pertanyaan dibawah ini!

1. Undang-Undang Nomor berapa yang menjadi dasar utama tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia...
 - A. 5 Tahun 2011
 - B. 12 Tahun 2011
 - C. 15 Tahun 2019
 - D. 13 Tahun 2022
2. Dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi. Di bawahnya, terdapat beberapa tingkatan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Tujuan utama dari hierarki peraturan perundang-undangan...
 - A. Membatasi kebebasan warga negara
 - B. Memberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah pusat
 - C. Menghindari konflik hukum antarperaturan
 - D. Menghapuskan peraturan yang tidak dibutuhkan
3. Apa yang menjadi dasar penyempurnaan tata urutan peraturan perundang-undangan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011...
 - A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015
 - B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022
 - C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
 - D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
4. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
 - 1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis
 - 2) dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - 3) berisi aturan pola dan tingkah laku
 - 4) didasarkan pada hukum tertinggi
 - 5) dicabut dan dapat digantikan oleh peraturan lainCiri dan sifat peraturan perundang-undangan ditunjukkan oleh angka ...
 - A. 1, 2, 3
 - B. 1, 3, 5
 - C. 2, 3, 4
 - D. 3, 4, 5
5. Putusan yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku disebut ...
 - A. Kepres
 - B. Perundang-undangan
 - C. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - D. Peraturan Pemerintah
6. Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
 - A. untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
 - B. untuk membatasi hak asasi manusia
 - C. untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
 - D. untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
7. Peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang disebut ...
 - A. Norma Adat
 - B. Dasar Negara
 - C. Peraturan sekolah
 - D. Peraturan Perundang-undangan
8. Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
 - A. sumber dari perundang-undangan
 - B. kaidah negara yang fundamental
 - C. norma dasar dan pertama
 - D. sumber hukum tertinggi

9. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah ...
 - A. undang-undang
 - B. UUD NRI Tahun 1945
 - C. Perpu
 - D. Perda
10. Tata urutan peraturan perundang undangan yang kedua adalah...
 - A. UUD 1945
 - B. Ketetapan MPR
 - C. Undang Undang
 - D. Peraturan pemerintah
11. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah
 - A. Presiden
 - B. MPR
 - C. DPR
 - D. Mahkamah Agung
12. Peraturan perundang-undangan yang keempat adalah...
 - A. UU dan Perpu
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. Peraturan Presiden
 - D. Peraturan Daerah Provinsi
13. Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan
 - A. Perpu
 - B. Perpres
 - C. Perda
 - D. UU
14. Bagaimana hierarki antara Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam tata urutan perundang-undangan...
 - A. UU lebih tinggi dari Perppu
 - B. Perppu lebih tinggi dari UU
 - C. UU dan Perppu setara dalam hierarki
 - D. Hierarki tergantung pada keputusan Presiden
15. Dalam urutan peraturan perundang-undangan, mana yang lebih tinggi antara Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)...
 - A. Peraturan Presiden
 - B. Peraturan Daerah Provinsi
 - C. Kedua peraturan setara
 - D. Tergantung pada konteks peraturan
16. Apa tujuan utama dari asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan...
 - A. Agar peraturan tersebut dapat dibatalkan
 - B. Agar peraturan dapat dibuat oleh siapa saja
 - C. Agar peraturan sesuai dengan kebiasaan lokal
 - D. Agar setiap peraturan memiliki tujuan yang ingin dicapai
17. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak..
 - A. Dua kali
 - B. Tiga kali
 - C. Empat kali
 - D. Lima kali
18. Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan peraturan Pemerintah adalah...
 - A. Perpres
 - B. Ketetapan MPR
 - C. Keputusan MPR
 - D. Undang – undundang

19. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua produk hukum lainnya harus merujuk pada dasar konstitusi ini. Dalam konteks hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat...
- Operasional
 - Fundamental
 - Sementara
 - Regional
20. Dalam hierarki hukum, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan lainnya harus sejalan dengan konstitusi ini. fungsi utama dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
- Mengatur teknis pelaksanaan pemerintahan
 - Menjabarkan visi dan misi kepala negara
 - Memberikan pedoman dasar bernegara
 - Mengatur hubungan antara masyarakat

MENCARI KATA

Carilah kata-kata yang berhubungan dengan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan baik secara diagonal, vertikal dan horizontal

P	T	Y	E	Q	H	S	T	N	S	H	B	K	U	B	P	F	A	Q	C
R	Z	N	N	G	K	O	E	Q	E	A	E	T	N	H	V	Z	V	U	O
H	C	C	A	R	T	M	J	Z	A	T	H	E	D	L	V	Y	Z	P	P
P	L	N	D	R	E	Z	Y	I	E	N	D	E	A	T	K	N	K	P	E
D	E	J	E	D	U	N	E	T	O	I	K	D	N	Y	Q	Z	W	R	G
O	O	R	N	D	H	T	A	Z	S	R	B	U	G	Z	F	W	G	E	O
X	Z	A	U	U	I	P	A	E	Z	E	O	J	U	I	U	W	B	P	C
Y	M	X	N	N	A	S	R	R	G	M	Q	B	N	S	E	G	J	Q	H
A	B	G	H	N	D	P	E	D	E	E	O	H	D	Q	G	G	J	Y	Y
P	B	A	M	C	F	A	P	R	A	P	K	C	A	Q	U	C	K	Z	M
A	M	P	S	Y	R	R	N	F	P	J	X	U	N	N	B	F	W	D	N
T	R	A	S	U	X	K	S	G	N	N	B	C	G	U	E	A	N	E	W
H	A	R	E	A	D	N	A	R	U	T	A	R	E	P	R	D	H	O	O
H	T	S	M	Q	P	P	T	B	P	N	P	R	X	G	N	M	D	P	X
P	R	O	V	I	N	S	I	Y	U	A	D	I	U	J	U	R	Y	P	W
X	F	X	D	I	I	V	P	E	K	P	H	A	F	T	R	K	U	R	H
H	V	U	R	P	M	G	C	X	O	Z	A	R	N	G	A	R	I	Y	J
U	R	R	W	V	X	N	V	A	R	E	I	T	T	G	P	R	T	Z	D
O	G	K	V	Y	Z	I	R	I	Q	Z	K	P	E	T	A	P	E	U	X
K	C	S	P	W	Q	Q	F	J	J	G	Q	W	A	N	Z	N	C	P	I

Perundang-undangan
Undang-undang
Ketetapan MPR
Peraturan daerah
Peraturan Presiden

Perppu
Amandemen
Provinsi
Kabupaten
Gubernur

DPR
MPR
Peraturan
Pemerintah
Presiden